

**PERAN DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN KOTA PEKANBARU
DALAM MENANGANI ANAK TERLANTAR TAHUN 2013**

Oleh:

Chandra Rizal

Dosen Pembimbing : Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Email : Chandrariizal28@yahoo.com

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

The role of the state in providing services to the community should be based on the basic values of Pancasila social justice for all Indonesian people, including in reducing social welfare issues. under the Act of 1945 in Article 34 Paragraph 1 mentioned the poor and neglected children who are maintained by the state, with this Government Pekanbaru Pekanbaru City Regional Regulation No. 12 Year 2008 concerning the social order in which the regulation is described in Chapter 1 Article 1 Paragraph 20, which reads "Social Guidance is a series of activities to grow, increasing the willingness and ability to target social skills counseling to enable them to carry out their social function normative", and verse 22 which says "Treatment is a process or way of preventive action, repressive and rehabilitative services to homeless and children in order to humanize back bums or beggars and children who have trouble on the streets ". Based on some of the phenomena that occur in the field, the writer can formulate the research title "The Role of Social Service and Pekanbaru City Cemetery In Tackling Neglected Children in 2013".

A fundamental problem in this research is the large number of abandoned children who have not been scouted as many as 2750 inhabitants that the authority of the government in this regard is the role of the Department of Social and Pekanbaru City Cemetery, then there are many factors inhibiting the implementation of coaching and training both internally and externally. Theory (approach) that I use as a tool of analysis in this study is the role of theory, policy and coordination. While the methods used in this study is a qualitative method, which seeks to analyze the role and constraints derived from observations and aim to reinforce and strengthen a theory so as to obtain information about the current situation. Data collection techniques in this research is to use the techniques of observation, interviews and documentation.

It can be concluded in this study that the role of the Department of Social and Pekanbaru City Cemetery is not working as it should because in reducing waif there are still some good in the process of empowerment and service that has not been optimized in accordance with Regulation 12 of 2008 on the Social Order. Then there are many factors that hinder the role of the Department of Social and Pekanbaru City Cemetery ie Internally form of budget, human resources and infrastructure. As well as external human resources and infrastructure that it is still lacking. So we need to realize that in an effort mengentaskan social welfare

issues need seriousness of Pekanbaru City Government for the realization of social welfare for the city of Pekanbaru.

Keywords : Role of Government, Neglected Children , Empowerment , Service

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang pertumbuhan penduduknya selalu meningkat dari tahun ke tahun terutama anak-anak. Anak adalah investasi dan harapan masa depan bangsa serta sebagai penerus generasi di masa mendatang.

Anak terlantar adalah anak yang berusia 5-18 tahun karena sebab tertentu (kemiskinan, kecacatan, korban bencana, dan anak yatim piatu) dan tidak dapat terpenuhi hak dan kebutuhannya secara dasar dengan wajar baik jasmani, rohani maupun sosial.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 34 Ayat 1 disebutkan Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara. Dengan demikian Negara bertanggung Jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin dan anak-anak terlantar yaitu kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan, dan dalam pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar di Indonesia dilakukan dengan memberikan hak-haknya secara normal layaknya anak-anak pada umumnya yaitu hak sipil dan hak kemerdekaan, lingkungan keluarga dan pilihan pemeliharaan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, rekreasi dan budaya serta asuhan, perawatan dan pembinaan.

Hal ini sebagaimana sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru dalam menangani anak terlantar pemerintah khususnya Dinas Sosial dan Pemakaman Kota

Pekanbaru dengan melakukan pembinaan terhadap anak terlantar yang ada di Kota Pekanbaru yang diatur dalam Peraturan Daerah No 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial yang mana dalam perda tersebut dijelaskan pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 20 yang berbunyi Bimbingan Sosial adalah serangkaian kegiatan untuk menumbuhkan, meningkatkan kemauan dan kemampuan sasaran bimbingan keterampilan sosial agar mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara normatif, dan Ayat 22 yang berbunyi Penanganan adalah suatu proses atau cara melakukan tindakan preventif, represif dan rehabilitatif terhadap gelandangan dan anak dalam rangka memanusiaikan kembali gelandangan atau pengemis dan anak yang mempunyai masalah di jalanan.

Dalam penanganan masalah anak terlantar negara juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Adapun indikasi dari anak terlantar adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang mengalami :

1. Kemiskinan (karena faktor ekonomi yang menyebabkan ketidaksanggupan orang tua atau keluarga dalam membiayai kebutuhan primer anak).

2. Kecacatan (karena faktor fisik yang menyebabkan ketidakmampuan untuk berbuat banyak untuk memenuhi kebutuhan primer).
3. Korban bencana (karena faktor bencana alam, dan bencana sosial).
4. Yatim piatu.

Adapun salah satu tugas Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam Bidang Rehabilitasi Sosial yang menangani anak terlantar yaitu mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan pembinaan lanjut, pelayanan sosial, pemberdayaan bagi penyandang cacat, anak terlantar, eks korban napza, bekas hukuman dan tuna susila.

Sesuai dengan Visi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yaitu terwujudnya kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Pemberdayaan

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dilandasi nilai-nilai kesetiakawanan serta pemakaman yang tertib dan indah. Dalam upaya mencapai Visi tersebut Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru telah menentukan sasaran dan prioritas dalam menyelesaikan masalah kesejahteraan sosial, yang termasuk ke dalam Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu :

1. Kemiskinan (fakir miskin, wanita rawan sosial dan ekonomi).
2. Ketunaan (gelandangan dan pengemis, wanita tuna susila).
3. Keterlantaran (anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, dan lanjut usia terlantar).
4. Kecacatan (cacat fisik, cacat mental, dan cacat ganda).
5. Korban bencana (bencana alam, dan bencana sosial).
6. Tindak kekerasan (korban tindak kekerasan, antara lain : anak, wanita dan lanjut usia).

Tabel I.1 : Jumlah Penduduk/Rumah Tangga Miskin dan Berumah Tidak Layak Huni Menurut Kecamatan Di Kota Pekanbaru Tahun 2012.

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga Miskin	Berumah Tidak Layak Huni
1	Tampan	179.470	667	131
2	Payung Sekaki	90.991	968	117
3	Bukit Raya	97.094	1.207	265
4	Marpohan Damai	130.244	1.544	137
5	Tenayan Raya	130.236	3.061	375
6	Lima Puluh	41.971	1.098	160
7	Sail	21.796	487	127
8	Pekanbaru Kota	25.764	847	146
9	Sukajadi	47.791	1.568	141
10	Senapelan	37.004	1.103	96
11	Rumbai	67.915	1.956	257
12	Rumbai Pesisir	67.663	1.652	168
Jumlah		937.939	16.158	2.120

Sumber: BPS Kota Pekanbaru Tahun 2012

Fenomena yang terlihat di Kota Pekanbaru saat ini masih sangat

tingginya anak terlantar, Anak-anak terlantar menjadi korban dari orang

tua yang tidak mampu dalam memenuhi hak dan kewajiban anaknya, sehingga anak menjadi terlantar, dan ada juga anak yatim piatu, korban dari bencana, dan kecacatan yang membuat anak-anak

tidak mampu berbuat banyak sehingga mereka menjadi anak-anak yang terlantar. Berikut akan dipaparkan jumlah (PMKS) :

Tabel I.2 : Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2013

No.	Jenis PMKS	Satuan	LK	PR	Jumlah
1	AnakBalitaTerlantar	Jiwa	14	13	27
2	AnakTerlantar	Jiwa	1328	1422	2750
3	AnakNakal	Jiwa	580	70	650
4	KeluargaRentanEkonomi	KK	240	110	350
5	AnakJalanan	Jiwa	380	142	522
6	Korbantindakkekerasan	Jiwa	188		188
7	Gepeng	Jiwa	54	97	151
8	Korban penyalahgunaan Napza	Jiwa	95	25	120
9	Keluarga fakir miskin	KK			17.555
10	Rumahtidaklayakhuni	KK			1.600
11	KorbanBencanaAlam	Jiwa			17.800
12	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	Jiwa			257

Sumber : Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, 2013

Fenomena anak terlantar terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut tidak terlepas pula dari permasalahan ekonomi orang tua mereka, tidak sedikit dari mereka para orang tua yang memiliki kecenderungan melepaskan pengasuhan atas anak mereka ketika beban ekonomi menghimpit mereka. Faktor lain yang dapat menjadi pendukung semakin banyaknya anak terlantar adalah orang tua mereka

yang memiliki keterbatasan fisik, seperti sakit sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan serta hak-hak anak secara optimal sehingga anak menjadi terlantar.

Belum lagi dengan cukup tingginya jumlah anak terlantar yang ada di Kota Pekanbaru, yang tercatat sebagai berikut :

Tabel I.3 : Banyaknya Anak Terlantar Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Dalam Kota Pekanbaru Tahun 2011.

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Tampan	155	97	252
2	Payung Sekaki	91	50	141
3	Bukit Raya	76	29	105
4	Marpoyan Damai	75	44	119
5	Tenayan Raya	129	119	248
6	Lima Puluh	22	14	36
7	Sail	19	14	33
8	Pekanbaru Kota	50	39	89

9	Sukajadi	69	23	92
10	Senapelan	69	29	98
11	Rumbai	102	61	163
12	Rumbai Pesisir	134	76	210
Jumlah		991	595	1.586

Sumber : BPS Kota Pekanbaru Tahun 2011

Dalam hal ini Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan tugas pembantuan dibidang pelayanan dan pemberdayaan sosial, seksi kesejahteraan anak, keluarga dan lansia, yang dibantu dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang lainnya, dan memiliki fungsi merumuskan kebijakan teknis di bidang sosial, penyelenggaraan urusan sosial meliputi pelayanan dan pemberdayaan sosial, bantuan dan perlindungan sosial, penyelenggaraan urusan sosial.

Melihat dari banyaknya anak terlantar yang ada di Kota Pekanbaru harusnya cepat ditangani oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Dinas Sosial dan Pemakaman melakukan beberapa hal demi menangani permasalahan anak terlantar di Kota Pekanbaru dengan

melakukan koordinasi dengan Panti-panti sosial yang turut membantu menangani anak terlantar salah satunya Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai

Adapun kriteria anak terlantar yang ditampung di PSBR Rumbai ini yaitu yang mengalami kemiskinan, kecacatan, korban bencana, serta anak-anak yatim piatu. Beberapa Program yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman dalam upaya menangani anak terlantar antara lain:

1. Pembangunan sarana dan prasarana, dapat berupa panti sosial.
2. Pembinaan mental.
3. Bimbingan sosial, dapat berupa pengetahuan agama dan perilaku para anak terlantar.
4. Keterampilan/pelatihan, dapat berupa mekanik sepeda motor, las, menyablon, latihan stir mobil, salon, tata rias, dan menjahit.

Tabel I.4 : Jumlah Anak Terlantar yang Dibina Oleh Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai pada tahun 2013.

No.	Anak Terlantar Berdasarkan Umur	LK	PR	Jumlah
1	Umur 9-13 Tahun	60	40	100
2	Umur 13-17 Tahun	60	40	100
Jumlah				200

Sumber : Data Olahan, 2014

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena dan observasi yang penulis dapatkan dan temukan dilapangan serta yang telah penulis paparkan pada latar belakang

masalah maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran Dinas Sosial dan Pemakaman Kota

Pekanbaru dalam menangani anak terlantar Tahun 2013 ?

2. Apa Saja Faktor-Faktor Penghambat Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam menangani anak terlantar Tahun 2013?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam menangani anak terlantar Tahun 2013.
- b. Untuk mengetahui hambatan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam menangani anak terlantar Tahun 2013.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis, yakni dapat diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu pemerintahan, minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian dibidang Ilmu Pemerintahan khususnya tentang menangani anak terlantar.
- b. Kegunaan akademis, yakni penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan melakukan penelitian dalam kasus yang sama.
- c. Kegunaan praktis, yakni sebagai bahan acuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang peran Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam menangani anak terlantar.

D. Kerangka Teori

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka penulis akan mengemukakan beberapa konsep teori yang mempunyai hubungan erat dengan permasalahan dengan judul penelitian. Sehingga akan diperoleh suatu rangkaian kerangka pemikiran berkaitan dengan konsep-konsep itu sendiri.

1. Teori Peran

Pengertian Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut. (Friedman, M, 1998 : 286)

Peran menunjuk pada organisasi tindakan dalam suatu tipe hubungan interaksi khusus Dua dimensi peran adalah kewajiban dan hak. Tindakan yang diharapkan akan dilaksanakan oleh seorang merupakan kewajiban suatu peran, tindakan atau respon orang lain merupakan hak. Konsep peran dihubungkan dengan konsep status, dalam penggunaan ini status hanya menunjuk pada posisi seseorang dalam suatu hubungan interaksi, bukan pada prestise yang terdapat pada seorang. Sehingga peran-status adalah satuan struktural yang paling mendasar sebagai syarat fungsional yang harus dipenuhi (Sofyan Cholid, 2009).

2. Teori Kebijakan

Pada saat sekarang persoalan publik menjadi lebih kompleks, tidak ada satu masalah hanya dipandang hanya satu aspek yang berdiri sendiri, tetapi terdiri dari berbagai aspek yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Keterkaitan itu tidak terbatas pada suatu lingkungan tertentu, tetapi dapat dipengaruhi oleh berbagai lingkungan yang luas yang berkaitan dengan aspek-aspek yang berbeda-beda berlaku secara cepat.

Pendapat lain mengemukakan bahwa secara umum kebijakan dapat dikatakan sebagai rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman laku guna mengatasi masalah publik yang memiliki tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas. Kebijakan merupakan pengembangan yang dilakukan oleh institusi pemerintah dan aparaturnya, sehingga kebijakan tersebut dapat dikatakan bahwa kebijakan pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan, kebijakan itu berisi tindakan atau pola tindakan pejabat pemerintah, kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk melakukan sesuatu. Kebijakan pemerintah dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa. (Koryati, 2005 :7).

3. Teori Koordinasi

Taliziduhu (2003:298) mendefinisikan koordinasi pemerintah sebagai proses kesepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau

unsur pemerintah yang berbeda beda pada dimensi waktu, tempat, komponen, fungsi, dan kepentingan, antar pemerintah dengan yang diperintah, sehingga disatu sisi semua kegiatan kedua belah pihak terarah pada tujuan pemerintahan yang telah ditetapkan bersama, dan disisi lain keberhasilan pihak yang satu tidak dirusak oleh keberhasilan pihak yang lain.

Koordinasi merupakan sebuah proses, proses koordinasi meliputi beberapa langkah. Sebagai proses, input koordinasi adalah saling memberi informasi tentang hal tertentu melalui pola komunikasi. Sumber informasi (*sender*) menyampaikan berita tertentu kepada masyarakat umum atau unit kerja lainnya (*receiver*). Unit kerja yang berkepentingan, bisa langsung menyesuaikan diri dengan informasi itu, atau memberikan feedback kepada sender atau masyarakat. Bila hal itu tidak cukup maka dilakukan tatap muka antar pihak yang menyampaikan informasi tentang kegiatannya, diadakan *adjustment*, tawar menawar, penyepakatan dan komitmen untuk menaati kesepakatan. Koordinasi seperti ini berbentuk forum dan bersifat *insedental* (Taliziduhu, 2003:296).

Dalton E McFarland (dalam Taliziduhu, 2003:297) menganggap koordinasi itu Adalah suatu konsep. McFarland mengukur koordinasi dari segi tingkat pencapaian tujuan, dia mengukur koordinasi dari segi efektifitas dengan indikatornya adalah harapan, *output*, dan *outcome*.

E. Definisi Konseptual

Untuk menyamakan persepsi tentang penelitian ini dan agar penelitian ini lebih terarah, maka

penulis mengoperasikan yang berkaitan dengan penelitian yaitu :

1. Peran adalah seperangkat kerja yang dilaksanakan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yang sesuai kedudukannya dalam menangani anak terlantar di Kota Pekanbaru.
2. Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah salah satu perangkat organisasi Pemerintah kota Pekanbaru yang berperan dalam menangani anak terlantar di Kota Pekanbaru.
3. Pembinaan, sebagai usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan guna mencapai tujuan tertentu.
4. Anak terlantar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak yang berusia 5-18 tahun karena sebab tertentu (kemiskinan, kecacatan, korban bencana, dan anak yatim piatu) dan tidak dapat terpenuhi hak dan kebutuhannya secara dasar dengan wajar baik jasmani, rohani maupun sosial.
5. Kebijakan adalah terjemahan *policy* yang dikaitkan dengan keputusan pemerintah. Hal ini diilhami oleh kata yang mempunyai arti wewenang dan kekuasaan yang di pegang oleh pemerintah, bertujuan untuk mengarahkan dan bertanggung jawab melayani umum.
6. Koordinasi adalah proses penyatuan paduan sasaran-sasaran dan kegiatan dari unit-unit yang terpisah untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Metode Penelitian

a. Jenis penelitian

Penulis menggunakan metode kualitatif dimana menjelaskan suatu

masalah dengan batasan terperinci, pengambilan data yang benar dan akurat serta menyertakan berbagai sumber informasi yang terpercaya. Penulis menguraikan penulisan ini dengan cara deskriptif yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang dikelilingi dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan atau subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang benar dan terpercaya (Soerjono Soekanto 2006: 10).

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini yaitu Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Dipilihnya Dinas Sosial dan Pemakaman sebagai objek penelitian karena Dinas Sosial dan Pemakaman bagian dari pemerintahan yang memiliki peranan penting dalam menangani anak terlantar yang ada di Kota Pekanbaru.

c. Informan penelitian

Informan penelitian merupakan orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang dianggap mampu memberikan keterangan kepada peneliti terkait permasalahan penelitian. Dalam penentuan informan pertama-tama dipilih satu orang atau dua orang, namun karena dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah informan menjadi banyak. Sugiyono, (2011 : 85).

d. Jenis Dan Sumber Data

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder.

1. Data Primer : Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan penelitian dengan menggunakan teknik wawancara terkait dengan Peran Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Menangani Anak Terlantar Tahun 2013. Data primer diperoleh berupa hasil dari wawancara dengan narasumber.
2. Data Sekunder : Data yang diperoleh dari tulisan, laporan maupun berbagai informasi dari Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, BPS Kota Pekanbaru dan instansi yang terkait dengan penelitian ini.

e. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data seakurat mungkin melalui teknik sebagai berikut :

- a. Observasi
Adalah pengamatan langsung di lapangan tentang peristiwa atau fenomena yang terjadi terutama yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Wawancara
Wawancara ini dilakukan dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan-pertanyaan lisan maupun tanya jawab secara terarah. Penelitian mengacu pada pedoman wawancara yang sudah dibuat, akan tetapi tidak menutup kemungkinan mengaju sejumlah pertanyaan-pertanyaan baru yang dapat mendukung keabsahan data.
- c. Dokumentasi
Data yang digunakan dengan cara meneliti laporan-laporan,

dokumentasi-dokumentasi, catatan, arsip serta berbagai kumpulan perundang-undangan yang dapat menunjang perolehan data sesuai dengan fokus penelitian.

f. Teknik Analisa Data

Setelah data atau bahan-bahan yang diperlukan, baik data primer maupun data sekunder berhasil terkumpul, kemudian penulis menganalisa dengan teknik analisa data yang bersifat deskriptif analisis. Yaitu mengenai kata-kata lisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti (Bagong Suyanto, 2005 : 166).

Dalam menganalisa data kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan, yaitu berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri (Usman. H dan Purnomo, 2000 : 81).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Menangani Anak Terlantar

Setiap tahun semakin banyak anak terlantar yang bertambah di Kota Pekanbaru, hal ini menjadi tanda tanya besar bagi sebagian masyarakat, peraturan manakah yang telah dibuat dan dijalankan oleh pemerintah untuk terus menekan lajunya jumlah anak terlantar yang terus bertambah di Kota Pekanbaru.

Pemerintah Kota Pekanbaru dan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru mempunyai tugas dibidang pemberdayaan sosial dan pelayanan, adapun dibidang

pemberdayaan sosial terdapat program-program yang berupa pembinaan dan pelatihan terhadap anak terlantar dan dalam bidang pelayanan berupa sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM) dalam menangani masalah anak terlantar yang ada di Kota Pekanbaru.

1. Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan sosial merupakan peran penting dalam menangani masalah anak terlantar di

Kota Pekanbaru, dalam tugas Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dibidang pemberdayaan sosial ada beberapa program-program kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam menangani anak terlantar dengan merumuskan program-program pembinaan dan program-program pelatihan terhadap anak terlantar di Kota Pekanbaru pada tahun 2013 yaitu :

Tabel III.1 Program Kegiatan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Pada Tahun 2013

NO	Nama Program	Tahun 2013
1	Program Pengembangan Bimbingan Sosial.	a. Pengembangan pembentuk karakter. b. Penegembangan perilaku dan pola pikir.
2	Program Keterampilan.	a. Keterampilan Salon, Tata Rias, Menjahit, Membordir, dan tata boga (Perempuan). b. Keterampilan Perbengkelan, Khursus Stir Mobil, dan Mesin (Laki-laki).
3	Program Pendidikan	a. Pemberian Beasiswa Bagi Anak Terlantar yang Kurang Mampu.

Sumber : Data Olahan, 2014

2. Pelayanan Sosial

a) Sarana dan Prasarana

Pembinaan dan pelatihan ini dilakukan oleh salah satu panti sosial yaitu Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) yang terletak di jalan Yos Sudarso, Kecamatan Rumbai, dan Loka Bina Karya (LBK).

Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai ini merupakan program dari Kemetrian Sosial yang didirikan pada tahun 1974. yang berfungsi untuk menampung anak-anak terlantar yang ada di Kota Pekanbaru, Panti Sosial Bina Remaja merupakan lembaga Rehabilitasi Sosial yang bertugas memberikan pembinaan bagi anak terlantar yang putus sekolah, secara profesional yang memungkinkan terwujudnya

kemandirian serta terhindarnya dari berbagai kemungkinan timbulnya masalah sosial. Anak terlantar yang dimaksud disini adalah warga Negara Indonesia, laki-laki dan perempuan yang berusia 5-18 tahun. Panti Sosial Bina Remaja juga merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Sosial RI yang juga memiliki peran dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan sosial, khususnya terhadap anak terlantar.

Adapun tugas pokok dari Panti Sosial Bina Remaja adalah melaksanakan pelayanan terhadap anak terlantar dari keluarga tidak mampu agar dapat terwujudnya kemandirian serta terhindar dari berbagai kemungkinan timbulnya masalah sosial.

Pembinaan dan pelatihan ini dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru melalui pihak ke 3 dikarenakan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru tidak memiliki pegawai penyuluh untuk pengembangan SDM masyarakat.

Pembinaan yang dilakukan oleh pihak Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai milik Kementerian Sosial Republik Indonesia. Adapun bentuk pembinaan yang dilakukan oleh PSBR ini berupa pembinaan fisik, sosial, spiritual, mental, dan keterampilan sebagai penunjang.

Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai Kementerian Sosial Republik Indonesia melakukan pembinaan terhadap anak terlantar setiap tahunnya, dalam setahun PSBR Rumbai ini menerima 200 anak terlantar untuk di bina. Bentuk program pembinaan yang dilakukan oleh PSBR Rumbai yaitu pembinaan fisik, sosial, spiritual, mental dan keterampilan sebagai penunjang.

Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai ini ada 2, yang pertama yaitu PSBR milik Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, dan yang kedua yaitu PSBR Rumbai milik Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru melalui panti sosial yang mereka punya untuk pembinaan anak terlantar yaitu PSBR 1 dan LBK, panti sosial yang ada tidak difungsikan untuk pembinaan anak terlantar.

Dengan fasilitas LBK yang ada dan cukup memadai, Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru melalui Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru harusnya melakukan pembinaan dan pelatihan di panti sosial yang sudah tersedia yaitu

PSBR 1 dan LBK, namun fakta yang terjadi dilapangan, penulis tidak menemukan kegiatan pembinaan dan pelatihan terhadap anak terlantar tersebut dikedua panti sosial milik Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

b) Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan pelayanan sosial untuk anak-anak terlantar ini, yaitu berupa pembinaan dan pelatihan masih terdapatnya hambatan yang terjadi di lapangan yaitu antara lain dari segi kurangnya jumlah pegawai penyuluh (Fungsional) dari Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

Pernyataan dari salah satu anggota DPRD Kota Pekanbaru periode 2009-2014 menggambarkan bahwa anak terlantar merupakan salah satu masalah bagi kemajuan sebuah Kota. Untuk itu diharapkan pemerintah agar terus mengurus permasalahan anak terlantar ini, agar terwujudnya Kota Pekanbaru menjadi Kota Metropolitan yang madani.

B. Faktor- Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Pembinaan dan Pelatihan Anak Terlantar Di Kota Pekanbaru

Adapun faktor internal dan eksternal yang menghambat pelaksanaan pembinaan anak terlantar di Kota Pekanbaru :

1. Faktor Internal

a) Anggaran Pendanaan dari Pemerintah

Pendanaan merupakan faktor penting dalam pelaksanaan program pembinaan dan pelatihan terhadap anak terlantar yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru untuk pengembangan anak terlantar. Bahkan Walikota

Pekanbaru Firdaus ST.MT, mengatakan jumlah belanja yang dialokasikan untuk bidang sosial sebesar Rp. 1.207.109.025,- yang digunakan untuk berbagai program sosial yang antara lain didalamnya terdapat program pembinaan kesejahteraan sosial anak terlantar (www.Pekanbaru.go.id).

Karena kurangnya anggaran pendanaan dari pemerintah yang dirasa oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, sehingga menyebabkan tidak semua program pembinaan dan pelatihan yang direncanakan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru terlaksana.

- b) Keterbatasan Jumlah Pegawai Penyuluh (Fungsional) Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru memiliki tenaga penyuluh (Fungsional) yang jumlahnya sangat terbatas karena banyaknya pegawai yang sudah pensiun atau di mutasi (pindah tugas) ke dinas lain. Jadi salah satu faktor penghambat pembinaan dan pelatihan terhadap anak terlantar belum optimal adalah keterbatasan pegawai penyuluh (Fungsional) yang menyebabkan tidak semua program pembinaan berjalan sesuai dengan rencana.

- c) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan elemen penting dalam melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap anak terlantar di Kota Pekanbaru. yang mana kurangnya sarana dan prasarana menyebabkan pembinaan dan pelatihan terhadap anak terlantar tidak sesuai sebagaimana yang diharapkan.

Sarana dan prasarana yang dibangun oleh pemerintah tidak

dimanfaatkan dengan baik oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, panti sosial yang ada di Kota Pekanbaru yang terletak di jalan Yos Sudarso dan di jalan Khairuddin Nasution, yang mana bangunan tersebut telah dibangun oleh pemerintah untuk menunjang kegiatan pembinaan dan pelatihan terhadap anak terlantar, namun bangunan tersebut terbengkalai tanpa adanya kegiatan pembinaan maupun pelatihan yang dilakukan.

2. Faktor Eksternal

- a) Sumber Daya Manusia Terbatas

Sebagian anak terlantar yang ada di Kota Pekanbaru mempunyai keterbatasan kemampuan sumber daya manusia hal ini dikarenakan sebagian besar anak terlantar yang ada di Kota Pekanbaru tidak memiliki pendidikan atau putus sekolah.

Keterbatasan faktor ekonomi dan tidak terpenuhi hak dan kewajiban anak merupakan salah satu faktor yang menyebabkan anak menjadi terlantar, keinginan anak untuk bersekolah tidak tercapai karena faktor ekonomi yang kurang memadai.

Dalam peran Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yaitu melakukan program pembinaan dan pelatihan terhadap anak terlantar yang ada di Kota Pekanbaru.

Pengembangan keterampilan yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru melalui pihak ke 3 PSBR 2 antara lain yaitu, keterampilan menjahit dan membordir untuk anak terlantar perempuan, sebagian anak terlantar kurang memahami teknologi mesin jahit dan bordir yang mana mesin-

mesin sudah menggunakan teknologi modern. Dan bagi anak terlantar laki-laki diberikan keterampilan berupa mesin otomotif, hal ini hampir serupa dengan yang terjadi pada anak terlantar perempuan, yang mana anak terlantar laki-laki belum paham akan penggunaan mesin-mesin otomotif yang berteknologi dengan umur mereka yang masih dibawah 15 tahun, akibat hal ini para anak terlantar sulit untuk mempelajari dan mengoperasikan mesin otomotif berteknologi tersebut.

b) Sarana dan Prasarana

Kebutuhan sarana dan prasarana berupa panti sosial seharusnya diperbanyak karena melihat jumlah anak terlantar berjumlah 2750 jiwa, sesuai dengan data yang diperoleh dari Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru bahwasannya di Kecamatan Tampan tercatat jumlah anak terlantar terbanyak yaitu berjumlah 252 anak, dan Kecamatan Tenayan Raya tercatat pada urutan kedua jumlah anak terlantar terbanyak dengan jumlah 248 anak.

Sarana dan prasaran merupakan salah satu faktor pendorong dalam menangani anak terlantar di setiap daerah yang ada di Kota Pekanbaru, seharusnya Pemerintah Kota Pekanbaru membangun beberapa sarana dan prasarana disetiap kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru yaitu berupa panti sosial untuk pembinaan anak-anak terlantar ini.

Kesimpulan

1. Pembinaan anak terlantar di Kota Pekanbaru dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota

Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 20 dan 22, melihat jumlah anak terlantar yang tiap tahunnya terus bertambah, Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu dalam pemberdayaan sosial dan pelayanan sosial, dalam hal ini Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap anak terlantar yang ada di Kota Pekanbaru. namun dalam pembinaan dan pelatihan anak terlantar ini, Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru mempunyai kekurangan pada pendataan anak terlantar yang dibina, pegawai penyuluh (Fungsional) serta tidak dimanfaatkannya PSBR 1 dan LBK yang dimana kedua panti sosial ini merupakan milik Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.

2. Pemerintah Kota Pekanbaru sangat berperan dalam menangani anak terlantar yang ada di Kota Pekanbaru, namun pemerintah Kota Pekanbaru tidak melakukan keseriusan dalam menangani anak terlantar, hal itu terlihat dari Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang ketertiban sosial yang dirasa kurang optimal, kurangnya anggaran juga menjadi faktor penghambat, serta kurangnya panti sosial milik pemerintah Kota Pekanbaru untuk dilakukannya kegiatan pembinaan dan pelatihan terhadap anak terlantar.
3. Dalam hal pembinaan dan pelatihan terhadap anak terlantar hanya ada 1 panti sosial milik Kementerian Sosial Republik Indonesia yaitu Panti Sosial Bina

Remaja (PSBR) Rumbai 2, dengan jumlah anak terlantar yang mencapai angka 2750 jiwa pada tahun 2013 di Kota Pekanbaru, PSBR 2 hanya bisa menampung 200 anak terlantar dalam kurun waktu 1 tahun dan yang nantinya akan dilakukan pembinaan dan pelatihan yang berkelanjutan terhadap anak terlantar.

Saran

Sebagai bahan masukan untuk meningkatkan mutu dan manfaat dari penelitian ini maka penulis menyampaikan beberapa saran :

1. Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru harusnya berbenah dalam menangani anak terlantar ini, dengan melakukan pendataan terhadap anak terlantar, serta menambah pegawai penyuluh, dan memaksimalkan sarana dan prasarana yang sudah ada dibuat oleh Pemerintah Kota Pekanbaru agar pembinaan dan pelatihan terhadap anak terlantar bisa terlaksana dengan optimal.
2. Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini harus lebih intens berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam menegakkan Aturan yang telah dibuat dalam hal ini Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008, karena Peraturan Daerah ini dirasa kurang optimal. Dan untuk sarana prasarana seharusnya pemerintah menambah panti-panti sosial untuk pembinaan anak terlantar, Panti sosial yang ada juga harus dimaksimalkan dalam melakukan pembinaan terhadap anak terlantar, karena hanya ada 2 panti sosial milik Pemerintah Kota Pekanbaru yang menampung anak terlantar.

3. Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) 2 milik Kementrian Sosial Republik Indonesia dirasa sudah melakukan tugasnya dalam pembinaan dan pelatihan terhadap anak terlantar, namun jumlah anak terlantar yang banyak dalam hal ini PSBR harusnya mampu menampung lebih dari 200 anak dalam kurun 1 tahun demi mengentaskan jumlah anak terlantar yang mencapai 2750 jiwa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks :

- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekanbaru.
- Bagong, Suyanto. 2005. dkk, *“Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan”*, Jakarta : Kencana.
- Cholid, Sofyan. 2009. *“Keluarga Dalam Perspektif Fungsional”*, Jakarta : Pasca Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial, UI.
- Dunn, Wiliam N. 2003. *“Pengantar Analisis Kebijakan Publik”*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Friedman, Marilyn M. (1992). *Family Nursing. Theory & Practice*. 3/E. Debra Ina R.L. (1998) (alih bahasa). Jakarta: EGC.
- Irwanto. 2011. *“Pusat Kajian Perlindungan Anak”*, FISIP, UI, Jakarta.
- Kozier, Barbara. 2008. *“Peran dan Mobilitas Kondisi Masyarakat”*, Jakarta : Penerbit Gunung Agung.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *“Kybernology (Ilmu*

- Pemerintahan Baru) Jilid 1*”, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Rasyid, M. Ryaas. 2002. *“Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan”*, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2000. *“Kamus Besar Sosiologi”*, Jakarta : Rajawali.
- _____. 2006. *“Sosiologi Suatu Pengantar”*, Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Sugiyono. 2011. *“Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif”*, Bandung : Alfabeta.
- Usman, Husaini, dan Purnomo Setiady Akbar. 2000. *“Metodologi Penelitian Sosial”*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2005. *“Teori dan Proses Kebijakan Publik”*, Yogyakarta : Media Pressindo.
- Peraturan Perundangan :**
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial.
- Media Online :**
- RiauPos.com
- Wikipedia.com
- www.Pekanbaru.go.id.